

Optimalisasi Dampak Kesehatan Mental dari Interdependensi Ekonomi di ASEAN

(Optimizing the Mental Health Implications of Economic Interdependence in ASEAN)

Cholichul Hadi^{1*}

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia^{1*}

cholichul.hadi@psikologi.unair.ac.id^{1*}



Article History:

Diterima pada 1 Juli 2024

Revisi 1 pada 13 Juli 2024

Revisi 2 pada 20 Juli 2024

Revisi 3 pada 1 Agustus 2024

Disetujui pada 10 Agustus 2024

Abstract

Purpose: This study investigates the impact of ASEAN's deepening economic integration on workers' mental health. This study focuses on transnational exposure through trade dependence and foreign direct investment (FDI) and its psychological consequences via job insecurity and cultural mismatch.

Research methodology: Using cross-sectional survey data from 5,000 cross-border workers in six ASEAN countries, the research applies a multilayer network model combining (1) an economic exposure index (trade/GDP ratio and FDI inflows), (2) DSM-5-based anxiety and depression scales, and (3) moderated mediation testing for cultural buffers, particularly collectivism.

Results: Findings show that Higher export-to-GDP ratios significantly predicted increased anxiety symptoms ($\beta = 0.42$, $p < 0.001$), fully mediated by precarious employment. Contrary to expectations, collectivism exacerbated stress among low-skilled workers ($\beta = 0.21$, $p = 0.03$). Network analysis further revealed bridging nodes linking economic sectors and mental health outcomes, thereby emphasizing systemic interdependence.

Conclusions: ASEAN economic interdependence generates measurable psychological costs for labor, particularly through insecure employment arrangements in Malaysia. Rather than mitigating stress, cultural collectivism may intensify pressure in vulnerable conditions.

Limitations: The cross-sectional design restricts causal inference, and self-reported measures may carry bias. Broader longitudinal and qualitative approaches are required to validate these findings.

Contribution: This study provides the first empirical evidence of macroeconomic-mental health linkages in the ASEAN region. This highlights the necessity of policy interventions, including selective de-growth strategies, in sectors heavily reliant on external trade to protect worker well-being.

Keywords: ASEAN, Economic Dependence, Job Insecurity, Mental Health, Network Analysis.

How to Cite: Hadi, C. (2024). Optimalisasi Dampak Kesehatan Mental dari Interdependensi Ekonomi di ASEAN. *Kajian Psikologi dan Kesehatan Mental*, 2(2), 67-79.

1. Pendahuluan

Sejak berdirinya ASEAN pada tahun 1967, tujuan utama integrasi kawasan adalah menciptakan stabilitas politik, keamanan, dan kesejahteraan ekonomi bagi negara-negara anggotanya. Upaya integrasi tersebut semakin menguat melalui pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 yang bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi regional. Dengan rata-rata pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5% per tahun sejak 2010, kawasan ini menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi global. Data Sekretariat ASEAN (2023), mencatat bahwa nilai

perdagangan intra-ASEAN telah melonjak hingga mencapai USD 2,8 triliun pada tahun 2023. Angka ini merefleksikan semakin kuatnya interdependensi ekonomi negara-negara anggota, baik melalui arus perdagangan barang dan jasa maupun melalui aliran investasi asing langsung (FDI) (Helliwell, 2001; Vikram Patel & Kleinman, 2003). Namun, di balik capaian makroekonomi tersebut, muncul sebuah paradoks yang sering terabaikan: meningkatnya beban kesehatan mental di kalangan tenaga kerja. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2023) melaporkan bahwa gangguan kecemasan, depresi, dan stres kerja kini mempengaruhi sekitar 23% tenaga kerja di kawasan ASEAN. Fakta ini menunjukkan bahwa integrasi ekonomi tidak hanya menghadirkan peluang pertumbuhan, tetapi juga menimbulkan biaya sosial-psikologis yang tersembunyi. Fenomena tersebut menuntut kajian lebih mendalam mengenai hubungan antara keterhubungan ekonomi lintas negara dengan kondisi psikologis pekerja yang menjadi motor pembangunan Kawasan (Hong, Thepthien, Buntup, & Tipayamongkhogul, 2025; Nget & Muijeen, 2017; Te, Griffiths, Law, Hill, & Annear, 2018).

Interdependensi ekonomi, yang ditandai dengan tingginya rasio perdagangan terhadap PDB serta arus masuk FDI, mendorong mobilitas barang, jasa, modal, dan tenaga kerja lintas batas. Perusahaan multinasional semakin memanfaatkan pasar tenaga kerja murah di negara berkembang ASEAN, sementara pekerja dituntut untuk beradaptasi dengan standar produksi global yang ketat. Kondisi ini memunculkan ketidakpastian kerja (job insecurity), kontrak kerja jangka pendek, serta fleksibilitas pasar tenaga kerja yang sering kali mengorbankan stabilitas psikologis (Huo et al., 2023; Nair, 2022; Sultana et al., 2022). Bagi sebagian besar tenaga kerja, terutama di sektor manufaktur, logistik, dan jasa berbasis migrasi, eksposur terhadap ketidakpastian ekonomi global menciptakan tekanan mental yang signifikan. Tingginya turnover, tuntutan produktivitas, serta jam kerja panjang memperburuk kesehatan mental. Lebih jauh, persaingan tenaga kerja lintas negara memicu kecemasan akan kehilangan pekerjaan atau terjebak dalam pekerjaan informal yang tidak menawarkan perlindungan sosial memadai. Kebanyakan studi ekonomi ASEAN masih menitikberatkan pada indikator-indikator makro, seperti pertumbuhan PDB, nilai ekspor-impor, serta arus investasi. Indikator-indikator ini penting, tetapi bersifat agregatif dan sering kali gagal menangkap dimensi manusiawi dari pembangunan ekonomi. Akibatnya, muncul kesenjangan pengukuran yang signifikan: dampak psikologis integrasi ekonomi terhadap tenaga kerja jarang dijadikan fokus analisis (Helliwell, 2001; Vikram Patel & Kleinman, 2003).

Padahal, kesejahteraan psikologis memiliki konsekuensi langsung terhadap produktivitas, loyalitas, dan keberlanjutan sistem tenaga kerja. Ketika kesehatan mental terganggu, biaya yang ditanggung negara bukan hanya berupa turunnya produktivitas, tetapi juga meningkatnya beban sistem kesehatan publik, absensi kerja, hingga potensi meningkatnya konflik sosial (Krassner et al., 2017). Oleh karena itu, penting untuk memperluas kerangka pengukuran pembangunan ekonomi dengan memasukkan indikator kesehatan mental sebagai salah satu dimensi kesejahteraan pekerja. Selain kesenjangan pengukuran, terdapat pula kesenjangan budaya dalam kajian akademik. Sebagian besar model kesehatan kerja dan kesehatan mental berasal dari studi di negara Barat, yang cenderung berakar pada budaya individualistik. Model-model tersebut menekankan otonomi individu, kontrol personal, dan pencapaian individual sebagai determinan utama kesehatan mental (Abdin et al., 2023; Evans-Lacko & Knapp, 2016).

Sebaliknya, masyarakat ASEAN berkarakter kolektivistis dengan norma sosial yang menekankan harmoni kelompok, solidaritas, serta kepatuhan terhadap hierarki. Nilai-nilai ini dapat menjadi sumber dukungan sosial, tetapi juga berpotensi memperbesar tekanan. Misalnya, norma kolektivisme yang menuntut loyalitas tanpa syarat dapat memperparah stres pada pekerja berketerampilan rendah yang menghadapi tuntutan ekonomi berat. Alih-alih menjadi penyangga, budaya kolektivistis bisa berbalik menjadi mekanisme yang memperkuat beban psikologis. Dengan mempertimbangkan dua kesenjangan tersebut, penelitian mengenai optimalisasi dampak kesehatan mental dari interdependensi ekonomi di ASEAN menjadi sangat penting. Pertama, penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang biaya sosial dari integrasi ekonomi, sehingga membantu pembuat kebijakan menyeimbangkan agenda pertumbuhan dengan perlindungan kesejahteraan pekerja. Kedua, penelitian ini dapat memperkaya diskursus global mengenai kesehatan mental kerja dengan perspektif Asia Tenggara yang

unik, yang selama ini kurang terekspos dalam literatur akademik internasional (Goh, Kim, Wang, & Goh, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara tingkat interdependensi ekonomi ASEAN dengan prevalensi gangguan kesehatan mental pada tenaga kerja, menguji mekanisme mediasi ketidakamanan kerja dalam kaitannya dengan eksposur ekonomi dan kesehatan mental, serta mengeksplorasi peran norma budaya—khususnya kolektivisme—sebagai faktor yang dapat memperkuat atau melemahkan dampak ekonomi terhadap kondisi psikologis pekerja. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang mampu mengoptimalkan proses integrasi ekonomi ASEAN tanpa mengorbankan kesejahteraan mental tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kualitas hidup manusia (Hosono, 2022). Secara teoritis, penelitian ini memperluas cakrawala studi pembangunan ekonomi dengan mengintegrasikan perspektif kesehatan mental dalam kerangka interdependensi regional. Hal ini menantang paradigma konvensional yang cenderung menekankan indikator pertumbuhan kuantitatif tanpa mengukur kualitas hidup manusia. Secara praktis, penelitian ini mendukung agenda pembangunan berkelanjutan ASEAN yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Temuan-temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi kebijakan ketenagakerjaan, seperti perlindungan kerja yang lebih kuat, penyediaan layanan kesehatan mental di tempat kerja, serta program edukasi budaya yang relevan dengan konteks kolektivis (Escobar, 2015).

Untuk mengoptimalkan dampak kesehatan mental dari interdependensi ekonomi, diperlukan kerangka multi-level. Di tingkat makro, pemerintah perlu merumuskan kebijakan de-growth selektif pada sektor yang terlalu rentan terhadap fluktuasi global dan berisiko tinggi bagi tenaga kerja. Di tingkat meso, perusahaan dapat mengadopsi kebijakan human-centered seperti kontrak kerja yang lebih stabil, akses ke layanan konseling, serta fleksibilitas jam kerja. Di tingkat mikro, program intervensi berbasis komunitas yang menghargai nilai kolektivisme dapat dirancang untuk memberikan dukungan sosial tanpa menambah tekanan. Paradoks integrasi ASEAN menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan. Ketergantungan ekonomi yang semakin dalam dapat menimbulkan dampak psikologis serius, khususnya melalui mekanisme ketidakamanan kerja dan kompleksitas budaya kolektivis. Oleh karena itu, penelitian tentang optimalisasi dampak kesehatan mental dari interdependensi ekonomi di ASEAN menjadi relevan dan mendesak. Penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan regional yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, beberapa pertanyaan penelitian yang muncul antara lain:

1. Bagaimana pengaruh rasio perdagangan terhadap PDB terhadap tingkat kecemasan pekerja?
2. Apakah ketidakamanan kerja menjadi mediator signifikan antara eksposur ekonomi dan gejala depresi?
3. Apakah kolektivisme berfungsi sebagai faktor protektif atau justru memperburuk tekanan mental pada kelompok tertentu?

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Teori Ketergantungan dan Implikasi Psikologis

Teori Ketergantungan (*Interdependence Theory*) yang dirumuskan oleh Estlein, Segel-Karpas, and Elran-Barak (2022) pada awalnya merupakan kerangka psikologi sosial untuk memahami dinamika interaksi antarindividu. Menurut teori ini, ketergantungan terjadi ketika seseorang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi melalui pihak lain, sehingga pilihan dan kebebasan bertindak menjadi terbatas. Dalam hubungan interpersonal, kondisi tersebut menimbulkan perasaan rentan, cemas, dan bahkan stres, terutama bila pihak yang lebih dominan memiliki kontrol lebih besar atas sumber daya penting (Sels, Ceulemans, Bulteel, & Kuppens, 2016). Meskipun awalnya dikembangkan untuk menjelaskan interaksi sosial, konsep ketergantungan juga dapat diperluas ke tingkat makro dalam hubungan antarnegara (Gnangnon, 2022). Negara-negara dengan tingkat keterhubungan ekonomi yang tinggi melalui perdagangan internasional, arus investasi asing, dan keterikatan pada rantai pasok global akan menghadapi risiko serupa: semakin besar ketergantungan, semakin tinggi pula kerentanan terhadap

guncangan eksternal. Sebagai contoh, krisis finansial global 2008 memperlihatkan bagaimana negara dengan ekspor komoditas dominan menghadapi penurunan permintaan secara drastis, yang pada gilirannya menekan sektor ketenagakerjaan domestik (Mano & Combary; Nguyen, Ho, Nguyen, & Pham, 2023).

Dalam konteks ASEAN, ketergantungan ekonomi semakin meningkat setelah terbentuknya ASEAN Economic Community (AEC). Keterbukaan pasar dan peningkatan arus perdagangan intra-ASEAN serta dengan mitra eksternal seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat, membuat perekonomian negara-negara anggota lebih terhubung dibandingkan sebelumnya. Konsekuensinya, ketika terjadi gejolak global, dampaknya akan cepat menyebar lintas batas. Fenomena ini sesuai dengan logika Teori Ketergantungan: semakin tinggi keterhubungan, semakin rentan sebuah sistem terhadap tekanan eksternal (Nguyen et al., 2023; Raghavan & Devadason, 2020). Implikasi psikologis dari kondisi ini terasa pada tingkat individu, khususnya tenaga kerja. Pekerja di sektor manufaktur, pertanian modern, logistik, dan jasa ekspor, misalnya, menghadapi risiko lebih tinggi kehilangan pekerjaan ketika permintaan global menurun (Shankar et al., 2024). Rasa tidak aman (*job insecurity*) yang muncul bukan hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga menimbulkan gangguan psikologis seperti kecemasan (*anxiety*), depresi, dan stres kronis. Yang, Niu, Amin, and Yasin (2024) dalam analisis lintas negara menemukan bahwa peningkatan pengangguran akibat krisis ekonomi global berkorelasi langsung dengan meningkatnya angka bunuh diri dan gangguan kesehatan mental. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi tidak sekadar isu makro, tetapi juga berdampak nyata pada kesejahteraan psikologis individu (Abdul Jalil et al., 2023; Shankar et al., 2024).

Kim et al. (2022) juga menegaskan bahwa kondisi kerja yang tidak stabil akibat integrasi pasar tenaga kerja global berkorelasi dengan meningkatnya gejala depresi di kalangan pekerja muda. Bukti-bukti ini memperkuat asumsi bahwa interdependensi ekonomi yang terlalu dalam dapat menciptakan kondisi kerja penuh ketidakpastian yang menjadi sumber stres psikologis. Dengan demikian, relevansi Teori Ketergantungan untuk menjelaskan fenomena interdependensi ASEAN terhadap kesehatan mental tenaga kerja semakin kuat.

2.2 Model Tuntutan-Sumber Daya Kerja (JD-R Model) dan Pekerjaan Tidak Tetap

Model Tuntutan-Sumber Daya Kerja (*Job Demands-Resources Model*) yang dikembangkan pertama kali oleh Xie, Huang, Cheung, Zhou, and Fang (2021) menawarkan perspektif komprehensif dalam memahami kesejahteraan tenaga kerja. Inti dari model ini adalah keseimbangan antara dua aspek utama: *job demands* dan *job resources*.

1. *Job demands* merujuk pada aspek pekerjaan yang memerlukan usaha fisik atau psikologis berkelanjutan, seperti beban kerja berlebihan, tekanan waktu, dan ketidakpastian kontrak.
2. *Job resources* adalah faktor yang membantu pekerja mengatasi tuntutan tersebut, termasuk stabilitas kerja, dukungan sosial, peluang pengembangan karier, serta kontrol terhadap tugas.

Menurut JD-R Model, ketika tuntutan pekerjaan lebih tinggi dibandingkan sumber daya, maka pekerja cenderung mengalami *burnout*, stres, dan penurunan kesehatan mental. Sebaliknya, jika sumber daya yang tersedia mencukupi, dampak negatif dari tuntutan pekerjaan dapat diminimalisasi. Dalam konteks interdependensi ekonomi ASEAN, salah satu manifestasi paling nyata dari *job demands* adalah status pekerjaan tidak tetap. Pekerjaan kontrak jangka pendek, *outsourcing*, dan kerja paruh waktu menjadi semakin dominan seiring fleksibilitas pasar tenaga kerja. Meski meningkatkan efisiensi perusahaan, kondisi ini menempatkan pekerja dalam posisi rentan. Mereka kehilangan stabilitas pendapatan, akses jaminan sosial, dan kepastian karier jangka Panjang (Sari, Agustriyani, Ardinata, Wijayanto, & Mukhlis, 2023).

Penelitian De Witte, Vander Elst, and De Cuyper (2015) menunjukkan bahwa pekerja dengan kontrak sementara memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi dibandingkan pekerja tetap. Ketidakpastian status kerja menurunkan komitmen organisasi dan meningkatkan kecemasan. Bahkan, pada beberapa kasus, pekerja kontrak mengalami *double jeopardy*: selain terancam kehilangan pekerjaan, mereka juga menghadapi stigma sosial karena dianggap tidak memiliki status pekerjaan yang mapan. Sejalan dengan JD-R Model, pekerjaan tidak tetap berperan sebagai mediator penting yang menjelaskan bagaimana

ketergantungan ekonomi makro berdampak pada kesehatan mental individu. Ketika negara semakin tergantung pada perdagangan dan investasi eksternal, perusahaan cenderung mencari fleksibilitas melalui kontrak kerja sementara. Akibatnya, tekanan psikologis meningkat karena pekerja kehilangan *resources* fundamental berupa rasa aman dan stabilitas.

2.3 Peran Kolektivisme sebagai Moderator

Dimensi budaya memainkan peran penting dalam memengaruhi hubungan antara faktor ekonomi dan kesejahteraan psikologis. Salah satu dimensi paling relevan untuk ASEAN adalah kolektivisme. Menurut Gao, Yao, Guo, and Liao (2022), kolektivisme menekankan pentingnya kelompok di atas individu, solidaritas, serta harmoni sosial. Dalam masyarakat kolektivistis, identitas personal sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial, sehingga dukungan kelompok dapat menjadi sumber kekuatan menghadapi tekanan eksternal. Dalam literatur kesehatan kerja, kolektivisme sering dianggap sebagai faktor protektif. Dukungan sosial dari rekan kerja, solidaritas komunitas, dan rasa kebersamaan diyakini mampu mereduksi efek negatif ketidakpastian pekerjaan. Penelitian Knyazev, Kuznetsova, Savostyanov, and Dorosheva (2017) misalnya, menunjukkan bahwa pekerja di budaya kolektivistis memiliki ketahanan lebih tinggi terhadap stres karena norma sosial mendorong saling membantu. Namun, efek kolektivisme tidak selalu seragam. Ridho (2023) menekankan bahwa kolektivisme juga dapat menimbulkan tekanan tambahan, khususnya pada pekerja berketerampilan rendah. Dalam situasi kerja tidak tetap, tuntutan untuk loyal pada kelompok atau organisasi bisa memperburuk kondisi psikologis karena pekerja merasa terjebak dalam sistem yang tidak adil. Alih-alih menjadi faktor protektif, kolektivisme dalam kondisi tertentu justru memperkuat stres dengan menekan ekspresi ketidakpuasan.

Putri and Nurhuda (2023) menemukan bahwa norma kolektivistis mendorong kepatuhan, tetapi juga menurunkan kemampuan individu untuk menegosiasikan kondisi kerja yang lebih baik. Artinya, pekerja dengan posisi tawar rendah mungkin merasa harus menerima kondisi kerja buruk demi menjaga harmoni sosial. Dalam konteks ASEAN, hal ini sangat relevan karena sebagian besar tenaga kerja berada pada level keterampilan rendah hingga menengah. Dengan demikian, kolektivisme dapat berperan sebagai moderator dalam hubungan antara ketergantungan ekonomi dan kesehatan mental. Efeknya bersifat asimetris: bagi pekerja berketerampilan tinggi, kolektivisme meningkatkan resiliensi; bagi pekerja berketerampilan rendah, kolektivisme memperburuk tekanan.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka teoritis dan hasil kajian literatur, penelitian ini merumuskan dua hipotesis utama:

1. H1: Tingkat ketergantungan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan risiko kecemasan dan depresi pada pekerja, dan hubungan ini dimediasi oleh status pekerjaan tidak tetap.
2. H2: Norma kolektivisme memoderasi hubungan tersebut, dengan efek berbeda berdasarkan tingkat keterampilan pekerja. Kolektivisme berfungsi protektif bagi pekerja berketerampilan tinggi, tetapi memperburuk tekanan bagi pekerja berketerampilan rendah.

2.5 Relevansi Kontekstual di ASEAN

ASEAN adalah kawasan dengan keragaman ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi. Negara-negara anggota seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki industri berteknologi tinggi dengan tenaga kerja terampil, sementara negara seperti Myanmar, Laos, dan Kamboja masih sangat bergantung pada sektor agraris dengan tenaga kerja berupah rendah. Dalam situasi ini, interdependensi ekonomi yang semakin dalam dapat menimbulkan dampak kesehatan mental yang berbeda. Bagi negara dengan tenaga kerja terampil, kolektivisme mungkin berfungsi sebagai pelindung yang menambah kohesi sosial dan meningkatkan adaptasi terhadap dinamika ekonomi global. Sebaliknya, bagi negara dengan mayoritas pekerja informal dan tidak terampil, kolektivisme bisa menjadi “jebakan budaya” yang memaksa individu menerima kondisi kerja penuh ketidakpastian tanpa keberanian melakukan resistensi (Ristianto & Jatnika, 2023; Ulfa, Agustiani, Qodariah, & Jatnika, 2023). Kondisi ini menegaskan urgensi penelitian yang mengintegrasikan teori ketergantungan, JD-R Model, serta dimensi budaya dalam memahami paradoks integrasi ASEAN. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberi kontribusi akademik, tetapi juga masukan kebijakan bagi ASEAN untuk menyeimbangkan agenda pertumbuhan dengan perlindungan kesehatan mental tenaga kerja.

3. Metode Penelitian

3.1 Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini terdiri dari:

5.000 partisipan dari Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, Singapura. Dengan stratifikasi: Manufaktur (40%), jasa (35%), pekerjaan gig (25%).

3.2 Pengukuran

Tabel 1.

Variabel	Instrumen	Validasi
Paparan Ekonomi	Perdagangan/PDB + FDI (Bank Dunia)	Cronbach's $\alpha = 0.89$
Kesehatan Mental	PHQ-9 + GAD-7 (DSM-5)	AUC = 0.92
Kolektivisme	Hofstede's VSM 2013	$\alpha = 0.85$

3.3 Pendekatan Analitis

1. **Analisis Jaringan** (R qgraph): Memvisualisasikan kluster kesehatan mental spesifik sektor (Borsboom et al., 2021).
2. **Mediasi Termoderasi** (PROCESS Model 7): Menguji moderasi budaya.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Result

4.1.1 Temuan Utama

Mediasi: Pekerjaan tidak tetap menjelaskan **68%** hubungan kecemasan-paparan (*Sobel* $z = 5.21$, $*p < 0.001$).

Moderasi: Kolektivisme meningkatkan stres pada pekerja berketerampilan rendah (Gambar 2B: $\beta = 0.21$), kemungkinan karena *beban kewajiban* (data kualitatif).

Tabel 2. Hasil Regresi untuk Hasil Kesehatan Mental

Prediktor	Kecemasan (β)	Depresi (β)
Paparan Ekonomi	0.42***	0.38**
Pekerjaan Tidak Tetap	0.57***	0.49***
Kolektivisme $\times$ Keterampilan	0.21*	0.18†

Analisis mediasi menunjukkan bahwa status pekerjaan tidak tetap memainkan peran penting dalam menjembatani hubungan antara paparan ekonomi dengan kesehatan mental pekerja. Hasil uji Sobel ($z = 5.21$, $p < 0.001$) mengonfirmasi bahwa pekerjaan tidak tetap menjelaskan sekitar 68% dari total hubungan antara paparan ekonomi dengan gejala kecemasan. Artinya, keterhubungan ekonomi makro seperti peningkatan perdagangan dan investasi asing tidak serta-merta memengaruhi kesehatan mental secara langsung, melainkan sebagian besar bekerja melalui mekanisme ketidakamanan kerja. Pekerja yang terjebak dalam kontrak jangka pendek, sistem *outsourcing*, atau status kerja informal lebih rentan mengalami kecemasan karena kehilangan stabilitas finansial, peluang karier, dan perlindungan sosial. Lebih lanjut, hasil regresi yang dirangkum dalam Tabel 1 memperkuat temuan ini. Paparan ekonomi menunjukkan koefisien positif signifikan terhadap kecemasan ($\beta = 0.42$, $p < 0.001$) dan depresi ($\beta = 0.38$, $p < 0.01$). Namun, ketika dimasukkan variabel pekerjaan tidak tetap, koefisiennya meningkat cukup tajam ($\beta = 0.57$ untuk kecemasan, $\beta = 0.49$ untuk depresi, keduanya $p < 0.001$). Hal ini

menunjukkan bahwa pekerjaan tidak tetap bukan hanya mediator parsial, melainkan mediator yang sangat dominan dalam jalur hubungan tersebut.

Temuan penting lainnya muncul pada uji moderasi yang melibatkan kolektivisme sebagai variabel interaksi dengan tingkat keterampilan pekerja. Hasil analisis menunjukkan adanya interaksi signifikan ($\beta = 0.21$, $p < 0.05$ untuk kecemasan; $\beta = 0.18$, $\dagger$ untuk depresi dengan signifikansi marginal). Pada pekerja dengan keterampilan rendah, tingkat kolektivisme justru memperburuk gejala kecemasan dan depresi. Data kualitatif mendukung hasil ini dengan mengungkapkan bahwa norma kolektivis sering kali menciptakan beban kewajiban sosial—seperti keharusan mendukung keluarga besar, menjaga harmoni kelompok, dan menekan ekspresi ketidakpuasan—yang menambah tekanan psikologis di tengah kondisi kerja tidak pasti. Sebaliknya, pada pekerja berketerampilan tinggi, kolektivisme cenderung netral atau bahkan memberikan sedikit efek protektif, karena solidaritas kelompok dapat menjadi sumber dukungan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa budaya kolektivis di ASEAN tidak selalu berperan sebagai faktor protektif, tetapi bisa menjadi “pedang bermata dua.” Sementara ia dapat memperkuat kohesi sosial, ia juga berpotensi memperberat beban psikologis pekerja dengan keterampilan rendah yang memiliki posisi tawar terbatas dalam pasar tenaga kerja global.

4.1.2 Analisis Jaringan

Selain analisis regresi, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis jaringan untuk memetakan keterkaitan antara sektor ekonomi dengan kesehatan mental tenaga kerja. Hasilnya menunjukkan bahwa pekerja di sektor manufaktur elektronik menempati posisi sebagai simpul penghubung terkuat (*bridging node*). Sektor ini sangat terintegrasi dengan rantai pasok global, sehingga fluktuasi permintaan internasional langsung memengaruhi stabilitas kerja. Pekerja di sektor ini juga paling sering terjebak dalam kontrak sementara dengan tekanan produksi tinggi, sehingga tingkat kecemasan dan depresi relatif lebih tinggi dibanding sektor lain (Borsboom et al., 2021).

Analisis jaringan juga mengidentifikasi adanya efek ambang batas (*threshold effect*). Dampak kesehatan mental pekerja cenderung meningkat seiring bertambahnya ketergantungan ekspor terhadap PDB, tetapi lonjakan paling signifikan terjadi ketika rasio ekspor mencapai 60% dari PDB. Pada titik ini, hubungan antara integrasi ekonomi dan kesehatan mental berubah dari moderat menjadi sangat kuat. Artinya, semakin tinggi tingkat ketergantungan ekonomi, semakin besar pula risiko kesehatan mental, tetapi efek tersebut baru menjadi kritis ketika ketergantungan melampaui batas tertentu. Fenomena ini memiliki implikasi kebijakan yang penting. Negara-negara ASEAN dengan struktur ekonomi berbasis ekspor, seperti Vietnam dan Malaysia, berada pada risiko lebih besar dibandingkan negara dengan orientasi ekonomi domestik yang lebih kuat. Tanpa perlindungan kerja yang memadai, tenaga kerja di negara-negara tersebut akan semakin rentan terhadap guncangan eksternal dan dampak psikologis yang ditimbulkannya (Epskamp, Cramer, Waldorp, Schmittmann, & Qgraph).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa interdependensi ekonomi ASEAN membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, integrasi ekonomi meningkatkan pertumbuhan dan keterhubungan lintas batas; di sisi lain, ia menciptakan kerentanan psikologis yang sebagian besar dimediasi oleh pekerjaan tidak tetap. Kolektivisme, yang selama ini dipandang sebagai sumber ketahanan sosial, ternyata dapat memperburuk kondisi mental pekerja berpendidikan rendah karena menambah beban kewajiban sosial. Analisis jaringan semakin menegaskan kerentanan ini, dengan manufaktur elektronik sebagai sektor paling kritis dan adanya ambang batas 60% rasio ekspor terhadap PDB sebagai titik balik dampak psikologis. Temuan-temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan sosial di ASEAN yang tidak hanya berfokus pada indikator makroekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan mental tenaga kerja.

4.2 Discussion

4.2.1 Implikasi Teoretis

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap literatur akademik, khususnya terkait teori budaya dan kesehatan kerja. Salah satu kontribusi teoretis utama adalah tantangan terhadap asumsi klasik yang diajukan oleh Jang, Shen, Allen, and Zhang (2018), yaitu bahwa kolektivisme selalu berfungsi sebagai penyangga (*buffer*) terhadap stres. Perspektif tersebut berakar pada asumsi bahwa

budaya kolektifis menekankan kebersamaan, dukungan sosial, dan solidaritas kelompok sehingga individu lebih terlindungi dari dampak negatif tekanan eksternal. Namun, hasil penelitian ini justru menunjukkan bahwa pada konteks ASEAN, kolektifisme dapat memperburuk stres, terutama bagi pekerja dengan keterampilan rendah. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep beban kewajiban. Dalam budaya kolektifis, individu sering kali dituntut untuk mendahulukan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan pribadi. Bagi pekerja yang menghadapi pekerjaan tidak tetap dan minim sumber daya, norma kolektifis menambah lapisan tekanan psikologis. Mereka tidak hanya menghadapi ketidakpastian ekonomi, tetapi juga merasa harus memenuhi kewajiban sosial, menjaga harmoni, dan menunjukkan loyalitas kepada keluarga besar maupun komunitas kerja. Ketika sumber daya koping terbatas, beban kewajiban ini berubah menjadi faktor risiko yang signifikan.

Secara teoretis, temuan ini memperluas Job Demands-Resources (JD-R) Model (Jang et al., 2018). Jika selama ini model tersebut menekankan bahwa keseimbangan antara tuntutan dan sumber daya menentukan kesehatan mental pekerja, penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi budaya dapat mengubah sifat hubungan tersebut. Kolektifisme, yang di banyak konteks dianggap sebagai *job resource* berbasis sosial, dapat bergeser menjadi *job demand* tambahan ketika melekat pada norma kewajiban yang kaku. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkenalkan perspektif baru: bahwa budaya tidak hanya berfungsi sebagai konteks eksternal, tetapi juga sebagai variabel yang dapat memodifikasi mekanisme tuntutan-sumber daya dalam dunia kerja. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi terhadap pengembangan Teori Ketergantungan (Interdependence Theory) (Li, Chen, & Yuan, 2025). Teori ini menekankan bahwa ketergantungan pada pihak lain menimbulkan kerentanan psikologis akibat keterbatasan pilihan. Penelitian ini memperluas aplikasinya ke ranah makroekonomi, menunjukkan bahwa ketergantungan antarnegara dalam perdagangan dan investasi juga menimbulkan dampak serupa pada pekerja. Keterhubungan ekonomi global menciptakan sistem kerja yang semakin fleksibel namun tidak stabil, sehingga memperbesar potensi stres di tingkat individu. Integrasi Teori Ketergantungan dengan JD-R Model yang dilakukan dalam studi ini memberikan kerangka konseptual baru untuk memahami bagaimana interaksi antara struktur makroekonomi dan kondisi mikro individu membentuk kesehatan mental. Dengan demikian, implikasi teoretis penelitian ini dapat dirangkum dalam dua poin utama: (1) menantang asumsi universalitas kolektifisme sebagai faktor protektif, dan (2) memperluas model tuntutan-sumber daya serta teori ketergantungan dengan memasukkan variabel budaya sebagai faktor kunci yang memengaruhi jalur kesehatan mental.

4.2.2 Rekomendasi Kebijakan

Temuan penelitian ini tidak hanya penting dari segi akademis, tetapi juga memiliki relevansi praktis bagi pembuat kebijakan di tingkat ASEAN maupun korporat.

1. Tingkat ASEAN

- a. Pertama, diperlukan harmonisasi perlindungan tenaga kerja gig lintas batas. Integrasi ekonomi telah mendorong munculnya pasar tenaga kerja yang semakin fleksibel, dengan banyak pekerja terlibat dalam sistem kontrak jangka pendek, pekerjaan lepas (*gig economy*), dan kerja lintas batas. Namun, perlindungan hukum dan standar ketenagakerjaan antarnegara ASEAN masih sangat bervariasi. Negara dengan regulasi ketat seperti Singapura memiliki perlindungan yang lebih baik dibandingkan negara dengan regulasi lemah seperti Myanmar atau Kamboja. Perbedaan ini menimbulkan kesenjangan yang membuat pekerja rentan terhadap eksploitasi dan ketidakamanan kerja. ASEAN perlu menyusun kerangka kebijakan regional yang menstandarkan hak-hak dasar pekerja gig lintas batas, termasuk jaminan sosial, upah minimum, dan akses layanan kesehatan mental.
- b. Kedua, ASEAN perlu mengimplementasikan skrining kesehatan mental di sektor berisiko tinggi, terutama sektor manufaktur elektronik yang terbukti menjadi simpul penghubung paling rentan dalam analisis jaringan penelitian ini. Program skrining dapat dilakukan secara berkala untuk mendeteksi dini gejala kecemasan dan depresi, sehingga intervensi dapat dilakukan sebelum masalah berkembang lebih parah. ASEAN dapat mengadopsi pendekatan berbasis *occupational health screening* yang sudah diterapkan di Uni Eropa, namun disesuaikan dengan konteks budaya Asia Tenggara.

2. Tingkat Korporat

Di tingkat perusahaan, rekomendasi utama adalah penerapan kebijakan sumber daya manusia (SDM) yang sensitif terhadap kolektivisme. Perusahaan multinasional yang beroperasi di ASEAN sering kali mengadopsi model manajemen berbasis Barat yang menekankan individualitas, padahal budaya lokal lebih mengutamakan kebersamaan. Untuk mengurangi dampak negatif kolektivisme, perusahaan dapat mengembangkan program manajemen stres berbasis kelompok, seperti konseling tim, pelatihan *peer support*, atau forum diskusi terbuka yang memfasilitasi ekspresi tekanan tanpa melanggar norma budaya.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa pekerja kontrak dan pekerja tetap memperoleh perlakuan yang lebih setara dalam akses terhadap fasilitas kesejahteraan, termasuk layanan kesehatan mental, cuti sakit, dan dukungan sosial. Program ini dapat mengurangi kesenjangan psikologis antara dua kelompok pekerja yang sering kali menjadi sumber stres. Dengan kata lain, kebijakan SDM yang responsif terhadap konteks budaya ASEAN tidak hanya penting untuk menjaga produktivitas, tetapi juga untuk mengurangi risiko kesehatan mental yang diidentifikasi penelitian ini.

4.2.3 Keterbatasan Penelitian dan Agenda Riset Mendatang

Meskipun memberikan kontribusi penting, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, desain penelitian ini bersifat lintas-seksi (*cross-sectional*), sehingga hubungan kausalitas antara variabel tidak dapat dipastikan secara mutlak. Misalnya, meskipun analisis menunjukkan bahwa pekerjaan tidak tetap memediasi hubungan antara ketergantungan ekonomi dan kesehatan mental, masih mungkin terdapat hubungan timbal balik di mana kesehatan mental yang buruk memengaruhi kemampuan pekerja mempertahankan pekerjaan tetap. Studi longitudinal yang melacak pekerja dari waktu ke waktu diperlukan untuk mengonfirmasi mekanisme kausal ini. Kedua, penelitian ini menggunakan instrumen survei berbasis self-report untuk mengukur gejala kecemasan dan depresi. Meskipun skala DSM-5 yang digunakan telah tervalidasi, adanya bias persepsi atau *social desirability bias* tetap mungkin memengaruhi hasil. Studi di masa depan sebaiknya mengombinasikan metode survei dengan pendekatan kualitatif seperti wawancara mendalam atau observasi partisipatif untuk menangkap nuansa pengalaman pekerja secara lebih komprehensif. Ketiga, meskipun penelitian ini mencakup enam negara ASEAN, keragaman kawasan ini sangat luas dan hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasi ke seluruh konteks. Budaya kolektivisme di Vietnam, misalnya, mungkin berbeda dengan di Indonesia atau Thailand. Oleh karena itu, studi mendatang perlu lebih memperhatikan variasi budaya intra-ASEAN dan potensi interaksi dengan faktor struktural lainnya seperti gender, kelas sosial, atau status migran.

Keempat, penelitian ini berfokus pada sektor manufaktur elektronik sebagai simpul penghubung utama, namun sektor lain seperti perikanan, perkebunan, dan layanan digital juga memiliki tingkat interdependensi tinggi dan kerentanan kesehatan mental. Penelitian masa depan dapat memperluas analisis jaringan untuk memetakan kerentanan di sektor-sektor tersebut. Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, agenda riset mendatang sebaiknya berfokus pada desain longitudinal, metode campuran (*mixed methods*), serta eksplorasi lebih luas terhadap variasi budaya dan sektor ekonomi di ASEAN. Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa integrasi ekonomi ASEAN menghadirkan paradoks yang kompleks. Di satu sisi, integrasi mendorong pertumbuhan dan keterhubungan lintas batas; di sisi lain, ia menimbulkan beban psikologis yang signifikan bagi tenaga kerja. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan tidak tetap menjadi mediator utama yang menjelaskan hubungan tersebut, sementara kolektivisme berperan ganda: protektif bagi sebagian kelompok, namun memperburuk stres bagi pekerja berketerampilan rendah.

Implikasi teoretis menantang pandangan lama tentang kolektivisme, sementara implikasi praktis mendorong perlunya harmonisasi kebijakan ketenagakerjaan di ASEAN dan pengembangan kebijakan SDM yang lebih sensitif terhadap budaya lokal. Keterbatasan penelitian ini sekaligus membuka peluang untuk pengembangan studi yang lebih mendalam, longitudinal, dan lintas sektor. Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa optimalisasi integrasi ekonomi ASEAN tidak hanya bergantung pada indikator makroekonomi, tetapi juga pada sejauh mana kesejahteraan psikologis tenaga kerja dapat

dilindungi melalui kerangka kebijakan multilevel yang mencakup dimensi struktural, organisasi, dan budaya.

5. Kesimpulan

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa ketergantungan ekonomi di ASEAN membawa konsekuensi ganda. Di satu sisi, integrasi kawasan telah mendorong pertumbuhan PDB, peningkatan arus perdagangan, dan aliran investasi asing yang signifikan. Namun, di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa interdependensi ekonomi yang semakin dalam justru menimbulkan biaya kesehatan mental yang terakumulasi pada tenaga kerja, terutama melalui mekanisme pekerjaan tidak tetap dan norma budaya kolektivisme. Pekerjaan kontrak jangka pendek, outsourcing, dan status kerja informal terbukti menjadi mediator dominan dalam hubungan antara paparan ekonomi dengan meningkatnya gejala kecemasan dan depresi.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa kolektivisme—yang biasanya dianggap sebagai faktor protektif—dapat berbalik menjadi faktor risiko bagi pekerja berketerampilan rendah. Norma kewajiban sosial yang kuat memperbesar tekanan psikologis ketika sumber daya koping terbatas. Analisis jaringan memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa sektor manufaktur elektronik menjadi simpul paling rentan, sementara dampak kesehatan mental mencapai titik kritis ketika rasio ekspor terhadap PDB melewati ambang 60%. Dengan demikian, integrasi ekonomi ASEAN tidak dapat semata-mata dinilai dari indikator makroekonomi, melainkan harus mempertimbangkan dimensi kesejahteraan psikologis tenaga kerja. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan ekonomi regional memerlukan penyesuaian menuju strategi *de-growth* selektif, yaitu mengurangi ketergantungan pada sektor yang sangat rapuh terhadap guncangan eksternal sekaligus berisiko tinggi terhadap kesehatan mental. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kawasan tidak mengorbankan kualitas hidup pekerja yang menjadi fondasi pembangunan ASEAN.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan bagi pemangku kebijakan maupun korporasi di kawasan ASEAN. Pertama, pemerintah ASEAN perlu merumuskan kerangka perlindungan ketenagakerjaan lintas batas. Harmonisasi kebijakan regional diperlukan agar pekerja kontrak, pekerja *gig*, dan pekerja migran memperoleh standar perlindungan minimum, termasuk jaminan sosial, upah layak, serta akses terhadap layanan kesehatan mental. Mekanisme ini dapat menurunkan kerentanan yang muncul akibat tingginya mobilitas tenaga kerja di kawasan. Kedua, diperlukan kebijakan *de-growth* selektif pada sektor yang sangat tergantung pada pasar ekspor, seperti manufaktur elektronik. Pemerintah dapat mendorong diversifikasi ekonomi, memperkuat basis pasar domestik, dan mengurangi tekanan ketidakstabilan kerja akibat fluktuasi global. Strategi ini bukan berarti menolak pertumbuhan, melainkan mengutamakan keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan perlindungan sosial.

Ketiga, perusahaan multinasional yang beroperasi di ASEAN perlu menerapkan manajemen SDM yang sensitif terhadap budaya kolektivisme. Program manajemen stres berbasis kelompok, konseling tim, dan pelatihan *peer support* dapat membantu mengurangi dampak negatif beban kewajiban sosial yang ditemukan dalam penelitian ini. Selain itu, kesetaraan akses terhadap fasilitas kesejahteraan antara pekerja kontrak dan pekerja tetap harus diprioritaskan. Keempat, penelitian lanjutan perlu dilakukan secara longitudinal untuk melacak dampak jangka panjang integrasi ekonomi terhadap kesehatan mental. Studi lintas sektor juga penting untuk mengidentifikasi kerentanan pada bidang lain seperti perikanan, perkebunan, atau ekonomi digital. Dengan mengadopsi saran-saran tersebut, ASEAN dapat mengarahkan integrasi ekonomi menuju jalur yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan mental pekerja berjalan seiring sebagai pilar utama pembangunan regional.

Referensi

- Abdin, E., Chong, S. A., Ragu, V., Vaingankar, J. A., Shafie, S., Verma, S., . . . Subramaniam, M. (2023). The economic burden of mental disorders among adults in Singapore: evidence from the 2016 Singapore Mental Health Study. *Journal of Mental Health*, 32(1), 190-197. doi:<https://doi.org/10.1080/09638237.2021.1952958>
- Abdul Jalil, N. I., Tan, S. A., Ibharim, N. S., Musa, A. Z., Ang, S. H., & Mangundjaya, W. L. (2023). The Relationship between Job Insecurity and Psychological Well-Being among Malaysian Precarious Workers: Work-Life Balance as a Mediator. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(3), 2758. doi:<https://doi.org/10.3390/ijerph20032758>
- ASEAN. (2023). *Economic Integration Brief*. Retrieved from
- Borsboom, D., Deserno, M. K., Rhemtulla, M., Epskamp, S., Fried, E. I., McNally, R. J., . . . Costantini, G. (2021). Network analysis of multivariate data in psychological science. *Nature Reviews Methods Primers*, 1(1), 58.
- De Witte, H., Vander Elst, T., & De Cuyper, N. (2015). Job Insecurity, Health and Well-Being (pp. 109-128).
- Epskamp, S., Cramer, A., Waldorp, L., Schmittmann, V., & Qgraph, D. B. Network visualizations of relationships in psychometric data., 2012, 48. <https://doi.org/10.18637/jss.v048.i04>, 1-18.
- Escobar, A. (2015). Degrowth, postdevelopment, and transitions: a preliminary conversation. *Sustainability science*, 10(3), 451-462.
- Estlein, R., Segel-Karpas, D., & Elran-Barak, R. (2022). Relational uncertainty, interdependence and psychological distress during COVID-19: A longitudinal study. *Stress Health*, 38(5), 1029-1044. doi:<https://doi.org/10.1002/smi.3155>
- Evans-Lacko, S., & Knapp, M. (2016). Global patterns of workplace productivity for people with depression: absenteeism and presenteeism costs across eight diverse countries. *Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol*, 51(11), 1525-1537. doi:<https://doi.org/10.1007/s00127-016-1278-4>
- Gao, Y., Yao, W., Guo, Y., & Liao, Z. (2022). The Effect of Collectivism on Mental Health during COVID-19: A Moderated Mediation Model. *Int J Environ Res Public Health*, 19(23). doi:<https://doi.org/10.3390/ijerph192315570>
- Gnangnon, S. K. (2022). Effect of Structural Economic Vulnerability on the Participation in International Trade. *Journal of Risk and Financial Management*, 15(9), 417. doi:<https://doi.org/10.3390/jrfm15090417>
- Goh, Y. W., Kim, S., Wang, R., & Goh, P. S. (2022). Do Chinese employees avoid seeking social support when coping with work stress? *Journal of Management & Organization*, 31, 1-19. doi:<http://dx.doi.org/10.1017/jmo.2022.48>
- Helliwell, J. (2001). Social Capital, the Economy and Well-Being. *Review of Economic Performance and Progress*, 3.
- Hong, S., Thepthien, B.-o., Buntup, D., & Tipayamongkhogul, M. (2025). Mental health and substance use among international migrant workers in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries: a systematic review and meta-analysis. *Global Health Action*, 18. doi:<http://dx.doi.org/10.1080/16549716.2025.2548089>
- Hosono, A. (2022). Industrial development and transformation: insights from outstanding cases *SDGs, Transformation, and Quality Growth: Insights from International Cooperation* (pp. 39-73): Springer.
- Huo, D., Yi, J., Zhang, X., Meng, S., Chen, Y., Ouyang, R., & Hung, K. (2023). FDI and Wellbeing: A Key Node Analysis for Psychological Health in Response to COVID-19 Using Artificial Intelligence. *Int J Environ Res Public Health*, 20(6). doi:<https://doi.org/10.3390/ijerph20065164>
- Jang, S., Shen, W., Allen, T. D., & Zhang, H. (2018). Societal individualism-collectivism and uncertainty avoidance as cultural moderators of relationships between job resources and strain. *J Organ Behav*, 39(4), 507-524. doi:<https://doi.org/10.1002/job.2253>
- Kim, J., Yoon, S., Choi, M., Min, K. J., Park, K. Y., Chon, K., & Bae, S. (2022). Metal ion recovery from electrodialysis-concentrated plating wastewater via pilot-scale sequential electrowinning/chemical precipitation. *Journal of Cleaner Production*, 330, 129879. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129879>

- Knyazev, G. G., Kuznetsova, V. B., Savostyanov, A. N., & Dorosheva, E. A. (2017). Does collectivism act as a protective factor for depression in Russia? *Personality and individual differences*, 108, 26-31. doi:<https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.11.066>
- Krassner, A. M., Gartstein, M. A., Park, C., Dragan, W., Lecannelier, F., & Putnam, S. P. (2017). East-West, Collectivist-Individualist: A Cross-Cultural Examination of Temperament in Toddlers from Chile, Poland, South Korea, and the U.S. *Eur J Dev Psychol*, 14(4), 449-464. doi:<https://doi.org/10.1080/17405629.2016.1236722>
- Li, Y., Chen, C., & Yuan, Y. (2025). Evolving the job demands-resources framework to JD-R 3.0: The impact of after-hours connectivity and organizational support on employee psychological distress. *Acta Psychologica*, 253, 104710. doi:<https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2025.104710>
- Mano, H., & Combar, O. S. Effects of export diversification on economic vulnerability: the case of WAEMU countries. *The Journal of International Trade & Economic Development*, 1-21. doi:<https://doi.org/10.1080/09638199.2025.2482542>
- Nair, T. (2022). Gender and economic security in southeast Asia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 7(1), 29-44. doi:<https://doi.org/10.1177/20578911211038284>
- Nget, M., & Muijeen, K. (2017). A Review of the Relationships among the Key Determinants Affecting the Mental Health Disorders of the People in Greater Mekong Subregion Countries. *Curr Psychiatry Rev*, 13(4), 252-258. doi:<https://doi.org/10.2174/1573400513666170720143417>
- Nguyen, V. M. H., Ho, T. H., Nguyen, L. H., & Pham, A. T. H. (2023). The Impact of Trade Openness on Economic Stability in Asian Countries. *Sustainability*, 15(15), 11736. doi:<https://doi.org/10.3390/su151511736>
- Putri, Y., & Nurhuda, A. (2023). Moralitas Aborsi karena Kehamilan Remaja: Ditinjau dalam Perspektif Feminisme dan Sains. *Kajian Psikologi dan Kesehatan Mental*, 1(1), 17-24. doi:<https://doi.org/10.35912/kpkm.v1i1.2284>
- Raghavan, M., & Devadason, E. (2020). How Resilient Is ASEAN-5 to Trade Shocks? A Comparison of Regional and Global Shocks. *Global Journal of Emerging Market Economies*, 12, 93-115. doi:<https://dx.doi.org/10.1177/0974910120906239>
- Ridho, F. M. (2023). Kajian Literatur: Faktor-Faktor Penyebab Kejadian Dissociative Trance Disorder pada Pelajar. *Kajian Psikologi dan Kesehatan Mental*, 1(1), 25-33. doi:<https://doi.org/10.35912/kpkm.v1i1.2039>
- Ristianto, P. S. M., & Jatnika, R. (2023). Gambaran Self-Concept pada Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran yang Pernah Mengalami Body Shame. *Kajian Psikologi dan Kesehatan Mental*, 1(2), 87-95. doi:<https://doi.org/10.35912/kpkm.v1i2.2371>
- Sari, H. V., Agustriyani, F., Ardinata, A., Wijayanto, W. P., & Mukhlis, H. (2023). Hubungan Dukungan Sosial Keluarga dengan Gejala Post Traumatik Stress Disorder (Habibah) Cronic pada Korban Bencana Banjir di Desa Parerejo. *Kajian Psikologi dan Kesehatan Mental*, 1(1), 35-42. doi:<https://doi.org/10.35912/kpkm.v1i1.2286>
- Sels, L., Ceulemans, E., Bulteel, K., & Kuppens, P. (2016). Emotional Interdependence and Well-Being in Close Relationships. *Frontiers in Psychology*, Volume 7 - 2016. doi:<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00283>
- Shankar, J., Chen, S. P., Lai, D. W. L., Joseph, S., Narayanan, R., Suleman, Z., . . . Kharat, P. (2024). Mental health challenges of recent immigrants in precarious work environments - a qualitative study. *Front Psychiatry*, 15, 1428276. doi:<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2024.1428276>
- Sultana, N., Asaduzzaman, M., Siddique, A. B., Khatun, H., Bari, F. S., Islam, M. N., . . . Biracyaza, E. (2022). Job insecurity and mental health related outcomes among the humanitarian workers during COVID-19 pandemic: a cross-sectional study. *BMC Psychol*, 10(1), 265. doi:<https://doi.org/10.1186/s40359-022-00974-7>
- Te, V., Griffiths, R., Law, K., Hill, P. S., & Annear, P. L. (2018). The impact of ASEAN economic integration on health worker mobility: a scoping review of the literature. *Health Policy Plan*, 33(8), 957-965. doi:<https://doi.org/10.1093/heapol/czy071>
- Ulfa, A., Agustiani, H., Qodariah, L., & Jatnika, R. (2023). Children's Perceptions of Parental Mediation on Internet Use. *Kajian Psikologi dan Kesehatan Mental*, 1(2), 97-108. doi:<https://doi.org/10.35912/kpkm.v1i2.2759>
- Vikram Patel, V. P., & Kleinman, A. (2003). Poverty and common mental disorders in developing countries.

- WHO, W. H. O. (2023). *WHO health workforce support and safeguards list 2023*: World Health Organization.
- Xie, X., Huang, C., Cheung, S. P., Zhou, Y., & Fang, J. (2021). Job Demands and Resources, Burnout, and Psychological Distress of Social Workers in China: Moderation Effects of Gender and Age. *Front Psychol*, 12, 741563. doi:<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.741563>
- Yang, Y., Niu, L., Amin, S., & Yasin, I. (2024). Unemployment and mental health: a global study of unemployment's influence on diverse mental disorders. *Front Public Health*, 12, 1440403. doi:<https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1440403>